



Ahok Curigai Pengadaan Pos Pemadaman Bergerak

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur Ahok terus menyalisir anggaran yang tidak masuk akal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Setelah pengadaan uninterruptible power supply (UPS), kini giliran pos pemadam bergerak jenis caravan yang disorot.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp28,5 miliar untuk pengadaan sebanyak 15 unit pos pemadam bergerak jenis caravan dalam APBD 2014. Awalnya, pagu anggaran pembelian pos pemadam bergerak sebesar Rp11,2 miliar. DPRD kemudian menambah sebesar Rp18,8 miliar, sehingga totalnya Rp30 miliar dan yang terserap Rp28,5 miliar.

Ahok menyebut pola penambahan dan pengurangan anggaran kegiatan dalam APBD sebagai upaya menyusupkan pokok pikiran (pokir) milik ang-

gota DPRD. Ia memerintahkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tidak memasukan pokir-pokir milik anggota DPRD ke dalam APBD. "Harusnya dihapus. Tidak boleh ada pokir lagi. Bisa dikenakan tindak pidana korupsi," tegasnya, Kamis (23/4).

Pos pemadam bergerak jenis caravan ini berbentuk kotak berwarna merah. Panjang setiap unitnya 5 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 3 meter. Sisi depannya terdapat pengait berangka segitiga dari besi. Fungsinya untuk mengaitkan barang tersebut ke mobil penarik.

Interior kotak berbentuk besi ini dilapisi kayu berwarna putih. Isi kotak tersebut dilengkapi dengan televisi 32 inchi, dispenser, tempat tidur, kamar mandi, dan radio. Sebuah genset tersemat dalam kotak itu sebagai sumber kelistrikan. Kotak yang diberi roda empat itu adalah pos pemadam kebakaran bergerak

jenis caravan.

BERDASARKAN KEBUTUHAN

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, Subejo menyatakan, pengadaan pos pemadam bergerak jenis caravan berdasarkan kebutuhan di lapangan. "Ini dalam rangka perbaikan biar respon time-nya cepet," katanya.

Ia menilai pos pemadam bergerak sangat cocok dengan kondisi Jakarta yang sudah sulit mencari lahan. "Pos ini bisa ditaruh di mana saja."

Subejopun menambahkan, pos pemadam bergerak adalah program kerja Ahok "Ini arahan gubernur. Kalau menolak berarti tidak mendukung pemerintah," ucapnya seraya menambahkan lantaran arahan Ahok, dalam APBD 2015, dinas kembali mengadakan pos pemadam bergerak jenis caravan dengan anggaran Rp30 miliar. (guruh/st)